



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BKK MUNTILAN

Perseroda

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025



PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta Km. 10 Mungkid 56512.
Tlp 0293-587808/782089

PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan LPS



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Muntilan (Perseroda)

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039976-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601478-24042026140204

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

itbkkmuntilan@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-24 14:02:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.1646/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2026

Kepada Yth,
PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)
Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km. 10 Mungkid, Kabupaten
Magelang

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2025 dari PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 27 April 2026

PERBARINDO

TANDA TERIMA

No.1646/GCG/Media-BPR/IV/2026

Kepada Yth,
PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)
Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km. 10 Mungkid, Kabupaten
Magelang

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2025 dari PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 27 April 2026

MediaBPR-PERBARINDO



**PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta
Km. 10 Mungkid 56512
itbkkmuntilan@gmail.com
(0293) 587808 782089
www.bprbkkmuntilan.co.id

Nomor : 0168/BPR BKK/M/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Transparansi Pelaksanaan
Tata Kelola Tahun 2025

Mungkid, 07 April 2026

Kepada :
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Jawa Tengah
Jalan Kyai Saleh No. 12-14
Di Semarang

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Perekonomian Rakyat
BKK Muntilan (Perseroda)



Agustinus Subekti Rahyuwono, SE
Direktur Utama YMFUK

Tembusan :
1. Arsip.



**PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta
Km. 10 Mungkid 56512
tbkkmuntilan@gmail.com
(0293) 587808, 782089
www.bprbkkmuntilan.co.id

Nomor : 0169/BPR BKK/M/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Transparansi Pelaksanaan
Tata Kelola Tahun 2025

Mungkid, 07 April 2026

Kepada :
Yth. DPP PERBARINDO dan Media BPR
Komplek Patra No. 46
Jalan Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Perekonomian Rakyat
BKK Muntilan (Perseroda)



Agustinus Subekti Rahyuwono, SE
Direktur Utama YMFUK

Tembusan :
1. Arsip.



SURAT PERSETUJUAN

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA

TAHUN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agustinus Subekti Rahyuwono, SE
Jabatan : Direktur Utama YMFUK
Alamat : Morisan 02/08 Cetan, Ceper, Klaten
2. Nama : Bergas Caturisasi Penanggungan, S.Sos, M.Si
Jabatan : Komisaris Utama
Alamat : Perum Muria Indah C287 02/07 Gondangmanis, Bae, Kudus

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Transparansi Tata Kelola PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) Tahun 2025.
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tersebut memuat antara lain :
 - a. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) penerapan tata kelola;
 - b. Aspek Transparansi

Demikian persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya.



Bergas Caturisasi Penanggungan, S.Sos, M.Si
Komisaris Utama

Magelang, 07 April 2026
PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)
Kabupaten Magelang



Agustinus Subekti Rahyuwono, SE
Direktur Utama YMFUK



BAB I PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) pada tahun 2025 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa:

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Bab XV Pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.003/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

- a. Ringkasan hasil penilaian sendiri (*self assesment*) atas penerapan tata kelola BPR, yang berisi peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*self assesment*) dan penjelasan atas peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*self assesment*);
- b. Pengungkapan penerapan tata kelola:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada);
- c. Kepemilikan saham anggota Direksi;
- d. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR;
- e. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris;
- f. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR;
- g. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS;
- h. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- i. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- j. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- k. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- m. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain.

2	Nama	:	Mulyono, S.E.
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Pemasaran
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>Terselenggarakannya kegiatan bank dalam bidang pemasaran dana maupun kredit, tercapainya aktiva produktif yang optimal, perlindungan konsumen, APU PPT, dan menghindari praktek-praktek yang merugikan bagi BPR dan mengurus & mengelola bank dengan baik.</p>			

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Terkait kondisi NPL yang semakin tinggi, Direksi telah melakukan:
 - a. Melakukan pemisahan fungsi penanganan kredit bermasalah dari divisi kredit (bisnis) menjadi divisi tersendiri, yaitu divisi remedial, guna meningkatkan fokus, independensi, serta efektivitas dalam proses penanganan, pemantauan, dan penyelesaian kredit bermasalah.
 - b. Meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam penyaluran kredit melalui penguatan kualitas analisis kredit, penyempurnaan kebijakan dan prosedur perkreditan, serta peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, antara lain pelatihan penyesuaian perjanjian baku serta pelatihan kredit konstruksi dan manufaktur.
 - c. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penanganan kredit bermasalah melalui keikutsertaan dalam pelatihan di bidang hukum perbankan, pengikatan jaminan, dan hukum litigasi, serta pelatihan penyelesaian NPL melalui mekanisme AYDA, sehingga proses penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan intensifikasi penagihan dan restrukturisasi kredit secara selektif terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha, serta mempercepat penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.
 - e. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi portofolio kredit secara berkala untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit sejak dini (*early warning system*), sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi risiko secara cepat dan tepat
2. Direksi telah melakukan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi pendapatan, dengan cara peningkatan produktivitas penyaluran kredit serta penguatan strategi bisnis guna menjaga rasio BOPO dalam kisaran target 80%–90%.
3. Direksi telah berupaya memperkuat pembangunan budaya kerja dengan menumbuhkan jiwa korsa melalui pelaksanaan program *capacity building*, pelatihan, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.
4. Direksi berupaya meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM melalui penguatan kebijakan dan prosedur internal, penyelenggaraan pelatihan kepada seluruh pegawai, pelaksanaan pengendalian internal secara lebih optimal, penguatan sistem informasi manajemen, serta peningkatan fungsi pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Komisaris
1	Nama : Bergas Catursasi Penanggungan, S.Sos, M.Si
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap BPR. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan RBB, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>). Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi:

1. Terkait kondisi NPL yang masih tinggi, agar Direksi melakukan upaya-upaya strategis untuk menurunkan tren NPL secara berkelanjutan.
2. Rasio BOPO agar dijaga dan dikendalikan sehingga tidak melampaui 100%, dengan target pencapaian pada kisaran 80%-90%.
3. Direksi agar membangun dan mengembangkan SDM yang memiliki jiwa korsa yang kuat, dengan memahami serta mengelola karakter masing-masing individu secara efektif.
4. Direksi agar memperkuat penerapan program APU dan PPT guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab

No	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Komite Audit : Nihil
	Tugas dan Tanggung Jawab
2.	Komite Pemantau Risiko : Nihil
	Tugas dan Tanggung Jawab
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi : Nihil
	Tugas dan Tanggung Jawab

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Indenpendensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite	Pihak Independen (Ya/Tidak)
1.	Nihil				

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit : Nihil
	Program Kerja
	Realisasi
	Jumlah Rapat
2.	Komite Pemantau Risiko : Nihil
	Program Kerja
	Realisasi
	Jumlah Rapat

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi : Nihil
	Program Kerja
	Realisasi
	Jumlah Rapat

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
	Nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
	Nihil			

D. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	Nihil				

E. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
	Nihil			

2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Komisaris	NIK	Sandi Bank lain	Sandi Perusahaan lain	Persentase Kepemilikan (%)
	Nihil				

F. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris BPR

No	Nama Anggota Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Komisaris Lain	Pemegang Saham
	Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris BPR

No	Nama Anggota Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Komisaris Lain	Pemegang Saham
	Nihil				

G. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	708.182.844	1	11.330.232
2	Tunjangan	2	45.394.566	1	396.558
3	Tantiem	2	1.181.122		0
4	Kompensasi berbasis saham		0		0
5	Remunerasi lainnya (THR)	2	57.459.745		0
	Total Remunerasi		812.218.277		11.726.790
	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan		0		0
2	Transportasi		0		0
3	Asuransi Kesehatan	2	16.445.724		0
4	Fasilitas lainnya		0		0
	Total Fasilitas Lainnya		16.445.724		0
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		828.664.001		11.726.790

Direksi memperoleh fasilitas transportasi berupa mobil dinas dan asuransi kesehatan berupa BPJS. Penetapan dan pengangkatan Komisaris Utama dilakukan pada 17 November 2025 melalui RUPS, sehingga yang bersangkutan hanya menerima gaji selama 1 (satu) bulan pada tahun 2025.

A

Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Selama tahun 2025 tidak ada kasus penyimpangan internal (*internal fraud*)

L. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah(satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 (satu)	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	1 (satu)
Total	1 (satu)	1 (satu)

Selama tahun 2025, terdapat 1 (satu) kasus permasalahan hukum perdata yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap, serta 1 (satu) kasus permasalahan hukum pidana yang masih dalam proses penyidikan.

M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ket
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	

N. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PENERIMA DANA	REALISASI
1	05/03/2025	Buka Bersama Forkompimda Kab. Magelang Tahun 2025	Setda Kab Magelang	10.000.000
2	10/03/2025	Bantuan Pengadaan Paket Sembako 20 Paket	Setda Kab Magelang (Dinas Perdagangan Koperasi & UKM)	1.570.000
3	30/04/2025	Bantuan 1 Unit PC Asus A3202WBAK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.499.000
4	15/05/2025	Parsitipasi Ibadah Kurban Tahun 2025	Setda Kab Magelang	3.500.000
5	20/05/2025	Donasi Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)	Kecamatan Windusari	1.000.000
6	03/06/2025	Pelatihan UMKM Desa Dampingan Kominfo di Desa Ngargosoko Kec. Kaliangkrik	Setda Prov Jateng	3.000.000
7	05/08/2025	Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SMA an Andhika Friza	Andhika Friza	1.000.000
8	05/08/2025	Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SMP an Maitsaa Putri	Maitsaa Putri	1.000.000

f

9	05/08/2025	Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SD an Ashifa Chumaira	Ashifa Chumaira	1.000.000
10	02/09/2025	Pembuatan Jamban untuk Keluarga Miskin	Setda Prov Jateng (Dinas Kesehatan)	6.370.000
Jumlah pengeluaran CSR sd 31 Desember 2025				33.939.000

Selama tahun 2025, telah disalurkan dana Untuk 10 Kegiatan Sosial yang menggunakan dana CSR sejumlah Rp.33.939.000,-.

BAB III PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga diupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian jika dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan update terhadap Laporan ini.

**Magelang, 07 April 2026
PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)
Kabupaten Magelang**



Bergas Gatursasi Penanggungan, S.Sos, M.Si
Komisaris Utama



Agustinus Subekti Rahyuwono, SE
Direktur Utama YMFUK